

## **Politik Islam dan Pemikiran Nurcholish Madjid**

**M. Yusuf Hasibuan**

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Email: [yusufhasibuan@gmail.com](mailto:yusufhasibuan@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemikiran dari tokoh sejarah peradaban politik Islam di Inonesia berpengaruh besar terhadap tatanan pemerintah. Dalam hal ini bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah, karena kaum muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, maka tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi nasioanal. Indonesia saat ini sebagai pemerintah yang dikatakan dengan negara kekuasaan dinasti kepemimpinan politik. Islam berperan penting dalam pembangunan negara kesaatuan dengan pedoman rahmatan lilalamim. Sebagaimana pengalaman traumatis masa lalu telah mendorong umat Islam untuk mendirikan partai politik. Namun mengapa Nurcholish Madjid menolak dengan adanya partai politik Islam, Nurcholish Madjid menawarkan ide pembaruan di masanya.

**Kata Kunci:** Indonesai, Politik, Islam, Nurcholish Madjid.

### **Abstract**

The thoughts of historical figures of Islamic political civilization in Indonesia had a major influence on government structure. In this case, a strong Islamic orientation is always associated with opposition to the government, because Muslims put forward political ideas that are not all congruent and similar to the practical demands of this republic, so prejudice grows between Islamic-oriented politics and a nationally oriented government. Indonesia is currently a government which is said to be a country ruled by political leadership dynasties. Islam plays an important role in the development of a unitary state with the guidance of rahmatan lilalamim. As past traumatic experiences have encouraged Muslims to establish political parties. However, why did Nurcholish Madjid reject the existence of an Islamic political party, Nurcholish Madjid offered the idea of reform in his time.

**Keywords:** Indonesia, Politics, Islam, Nurcholish Madjid.



## Pendahuluan

Umumnya nasionalisme bangsa Indonesia muncul sekitar abad 20. Muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk, secara aktif terlibat dalam pengembangan nasionalisme Indonesia. Mereka mengambil bagian dalam organisasi sekuler atau organisasi keagamaan seperti SI (serikat Islam), muhammadiyah, NU (nahdlatul ulama), dan Persis (persatuan Islam). Walaupun terjadi kompetisi antara umat Islam dan kristiani, umat Islam bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lain berjuang melawan penjajahan belanda dan jepang. Pada tahun 1937 umat Islam mendirikan MIAI (majlis Islam A'la Indonesia), yang berjuang untuk menjaga kepentingan umat Islam di bawah pendudukan jepang.<sup>1</sup>

Dalam hal ini agak disayangkan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah, karena kaum muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, maka tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang berorientasi nasional. Oleh karena itu dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi keIslaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefenisikan secara lebih inklusivitas. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti (*shared*) semua muslim, di dalam maupun luar pemerintah.<sup>2</sup>

Oleh karena itu perlu gagasan modernisme Islam Indonesia, suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivitas politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus memfokus pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka dan adil. Pada tingkat nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik lebih luas antara orang-orang yang saling punya perhatian kepada demokrasi yang menuntut keterbukaan sikap.<sup>3</sup>

Nurcholish Madjid lebih jauh mengemukakan bahwa perkembangan yang pesat dan penyebaran Islam yang sangat menggembirakan selama ini keseluruh pelosok Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Dan pasal yang dikaitkan dengan masalah tadi ialah isu tentang apakah umat itu tertarik pada organisasi-organisasi Islam. "Islam Yes, partai Islam No" yang disodorkan Nurcholish Madjid, telah menjadi keprihatinan mayoritas umat. Mengapa organisasi Islam runtuh sebagai model gerakan, justru ketika Islam sebagai agama dan sebagai kumpulan ide-ide sedang mengalami kemajuan, kalau saja organisasi-organisasi Islam menjadi wadah atau kesadaran bagi gagasan Islam, mengapa umat tidak terpicat. Menurut Nurcholish Madjid umat tidak terpicat disebabkan organisasi-organisasi Islam tidak lagi melakukan dukungan massa seperti yang pernah terjadi di masa lalu.<sup>4</sup> Dan hal lain disebabkan,

---

<sup>1</sup>Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 53.

<sup>2</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.89.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 205



*pertama*, karena sifat pemikiran yang ditawarkan dan disebarakan dengan aktif oleh organisasi-organisasi tersebut mengalami masturbasi. Dan *kedua*, karena partai-partai Islam dan pimpinannya kehilangan kepercayaan di mata masyarakat.<sup>5</sup>

Pengalaman traumatis masa lalu telah mendorong umat Islam untuk mendirikan partai politik. Namun mengapa Nurcholish Madjid menolak dengan adanya partai politik Islam, Nurcholish Madjid menawarkan ide pembaruan politik dengan mengeluarkan slogan “Islam Yes, partai Islam No”. yaitu pemikiran yang dianggap sekuler dengan ide pemisahan agama dari hal yang bersifat praktis yaitu politik.

Kekalahan partai berazas Islam dalam pemilihan umum 7 juni 1999 benar-benar telak. Hanya partai persatuan pembangunan (PPP) yang meraih suara signifikan dan masuk lima besar, perolehan partai bulan bintang (PBB) jauh di bawah perkiraan, meski berhasil membentuk fraksi sendiri di DPR dengan 13 anggota. Partai keadilan (PK) hanya memetik 7 kursi di DPR, gagal memenuhi ketentuan perolehan minimal (*threshold*) dua persen dari total, dan dengan demikian terlikuidasi untuk pemilu 2004.

Apa yang sesungguhnya yang sedang terjadi pada umat Islam di Negara mayoritas muslim ini? Mengapa Islam tampak kurang kuat sebagai azas formal untuk menarik dukungan? Mengapa mayoritas muslim justru mendukung partai-partai nasionalis-kristen dan sekuler? Apakah fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin kurang percaya bahwa aspirasi mereka akan diakomodasi secara layak oleh partai-partai Islam, dan justru lebih yakin aspirasi itu akan lebih terakomodasi oleh partai-partai non-Islam? Jika memang ada ketidakpercayaan semacam itu, apa penyebabnya, apakah karena para politisi Islam yang mewakili partai-partai itu dianggap tidak kredibel, baik secara moral, intelektual maupun teknikal.

## **Pembahasan**

### **Politik**

Dilihat dari sisi bahasa, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota yang berstatus Negara kota (*city state*). Yang dimana Negara kota di zaman Yunani, masyarakat saling berkerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan didalam hidupnya.<sup>6</sup> Politik yang berkembang di masa Yunani kala itu dapat diartikan sebagai sebuah proses hubungan antara individu dengan individu lainnya untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai (pengetahuan) mengenai kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan) dan segala urusan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau

---

<sup>5</sup>Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal diIndonesia*.Terjemahan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Pustaka Antara, 1999), hlm. 104.

<sup>6</sup>Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), hlm. 2.



terhadap Negara lain, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah (kebijaksanaan).<sup>7</sup>

Dalam Islam, kata politik sering diwakili dengan kata *al-siyasah* dan *daulah*, yang dimana kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya adalah istilah yang berhubungan dengan politik misalnya keadilan, musyawarah, yang awal mulanya bukan ditunjukkan untuk masalah politik. Kata *siyasah* dapat ditemui dalam bidang kajian hukum yaitu ketika membahas masalah *imamah*, sehingga dalam fiqih dikenal adanya pembahasan tentang *Fiqih Siyasah*. Selanjutnya kata *daulah* pada mulanya digunakan dalam al-Quran yang tujuannya digunakan untuk kasus penguasaan harta di kelompok orang kaya, yakni bahwa zakat seharusnya harta tersebut tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus bergilir atau berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya (*dulatan baina agniya*), kata *daulah* tersebut juga digunakan untuk pembahasan politik yang sifatnya perpindahan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Selanjutnya kata keadilan banyak dijumpai dalam memutuskan perkara dalam kehidupan, dan kata musyawarah pada awal mulanya digunakan pada masalah suami istri yang hendak menyerahkan anaknya untuk disusui oleh wanita lain yang dalam perkara ini perlu dimusyawarahkan. Selanjutnya dalam perkembangan sejarah kata *siyasah* dan kata-kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengertian pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan serta hal-hal lainnya yang terkait dengannya.<sup>8</sup>

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang artinya tidak dapat terlepas dari gejala konflik kerja sama.<sup>9</sup> Dengan pengertian tersebut, secara tidak tertulis mengungkapkan bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses hubungan pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disetujui sesuai dengan kepentingan setiap kelompok.

### **Tujuan Politik Islam**

Tujuan politik Islam adalah untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar seluruh hukum dan syariat Islam. Tujuan utamanya

---

<sup>7</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMENDIKBUD, 2017), hlm. 600.

<sup>8</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 268.

<sup>9</sup>Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 16.



adalah menegakkan sebuah Negara Islam atau Darul Islam. Para fuqaha telah menggariskan 10 poin penting sebagai tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam:<sup>10</sup>

- a. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf dari kalangan umat Islam
  - b. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
  - c. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar umat Islam dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
  - d. Melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan demi melindungi hak-hak manusia
  - e. Menjaga perbatasan Negara untuk menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar
  - f. Melakukan jihad bagi golongan yang menentang Islam
  - g. Mengendalikan urusan pengutipan pajak, zakat, dan sedekah
  - h. Mengatur anggaran belanja Negara, melantik pegawai yang cakap dan jujur untuk mengawasi kekayaan Negara
  - i. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan terhadap pemimpin Negara demi melindungi agama (*Ad-Din*)

### **Sistem Politik Islam**

Dalam sistem politik Islam kebijakan untuk mengatur pemerintah yang berdaulat atau mengatur masyarakat dalam bernegara. Maka sistem politik Islam (*siyasah*) ada tiga bagian, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara serta ummah yang menjadi pelaksana undang-undang tersebut.<sup>11</sup>

- b. Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah adalah politik yang titik beratnya mengatur hubungan antara Negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh

---

<sup>10</sup>Abdullah Zawari., *Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>11</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.



pemerintah di Negara-negara Islam dalam berhubungan dengan Negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung pada kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad Saw. Terhadap Negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan al-Khulafa' al-Rasyidun dan para pelanjut mereka.<sup>12</sup>

c. Siyasaah Maliyah

Siyasaah maliyah adalah sistem politik Islam yang mengatur bagaimana cara-cara yang harus diambil untuk mengharmoniskan orang-orang miskin dan orang-orang kaya agar tidak terjadi kesenjangan dan menyangkut juga tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan pengelolaan, *zakat*, *khumus al-Ghana'im* (harta rampasan perang), *fai'* (harta yang diperoleh tanpa peperangan), *jizyah* (pajak penduduk non-muslim kepada pemerintah Islam), *'usyur al-Tijarah* (pajak perdagangan untuk pedagang non-muslim), *kharaj* (pajak tanah non-muslim).<sup>13</sup>

### Partai Politik Islam

Mengenai pengertian partai politik cukup banyak sarjana telah mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Carr (1965), "*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*" (partai politik adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).
- b. Nimmo (1973), "*a political party is a condition of fairly stable, enduring, and frequently conflicting interest, organized to mobilize support in competitive election in order to control policy making*".
- c. Ranney (1990), "*a political party is an organization that sponsors candidates for political office under the organization's name*".

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian partai politik menurut Undang-undang No. 31 tahun 2002, menyatakan bahwa "partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum".

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 215

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 273.

<sup>14</sup>Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), hlm. 208.

<sup>15</sup>Miriam budiardjo, *Op. Cit*, hlm.161.



Sedangkan pengertian partai politik Islam adalah sebagai organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level eksekutif, legislatif. Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui partisipasi dalam pemilu serta melakukan kampanye dengan memakai isu dan program-program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>16</sup>

Selanjutnya kemudian muncul istilah partai Islam, atau partai yang berlandaskan pada simbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak bisa mengelak dengan menjamurnya partai-partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam.<sup>17</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut, partai yang berasaskan Islam dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, partai Islam yang berasaskan Islam, kedua, partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila, ketiga, partai Islam yang berasaskan pancasila tetapi berbasis massa Islam.

Setelah mengetahui pengertian partai politik yang telah dikemukakan diatas, ada tiga prinsip dasar dari partai politik, yaitu:

- a. *Partai Sebagai Koalisi*. Yaitu membuat koalisi dari berbagai kepentingan untuk menciptakan kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Dalam tubuh GOLKAR misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri, demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan terdapat faksi NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena antara satu sama lain berusaha menjadi dominan. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.
- b. *Partai Sebagai Organisasi*. Untuk menjadi lembaga yang eksis, dinamis, dan jangka panjang partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus suara dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan simbol partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan doktrin kepada anggota-anggotanya untuk setia kepada partai.
- c. *Partai Sebagai Pembuat Kebijakan (Policy Making)*. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik

---

<sup>16</sup>Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 8.

<sup>17</sup>Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik Dalam Khazanah Klasik*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 15.



mendukung secara mutlak para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya (nepotisme), bahkan ikut serta memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolektif partai.

Dari tiga prinsip dasar partai politik di atas, bisa dibedakan antara partai politik, gerakan (*movement*) dan kelompok penekan. *Gerakan* adalah kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan, atau menciptakan suatu lembaga masyarakat baru dengan memakai cara-cara politik. *Kelompok Penekan* (*pressure group*) biasanya lebih banyak digunakan dengan istilah kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok penekan adalah kelompok yang memperjuangkan suatu kepentingan dan memberi pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan yang merugikan.

### **Nurcholish Madjid**

Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyer, Jombang, sebuah desa di Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan oleh Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang mana beliau adalah salah seorang diantara Founding Father Nahdlatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyah.<sup>18</sup> Adapun anak dari pasangan Nurcholish Madjid dan Omie Komariah Madjid ada dua yang pertama Ahmad Mikail Madjid dan Nadya Madjid

Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal panggilan Cak Nur, Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Nurcholish Madjid meninggal dunia akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara, sebagai penerima Bintang Mahaputra.

Nurcholis Madjid seorang tokoh modernisasi pemikiran Islam, Nurcholis Madjid mengembangkan konsep kemodernan dengan mengaitkan pada konsep *tauhid*, konsep yang selalu diulang dalam tulisannya dan yang menjadi inti tesis besarnya. Bagi Nurcholish Madjid kemodernan menjadi perburuan tanpa akhir dan merupakan keharusan bagi semua manusia, umat muslim khususnya. Hal itu tidak lain karena sifat keterbatasan manusia sendiri sebagai akibat kesementaraan pengetahuannya. Oleh karena

---

<sup>18</sup>Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 21.



itulah sikap terbuka harus dimiliki oleh setiap muslim, sebagaimana diperintahkan tuhan. Tetapi satu hal yang perlu dan lebih utama dari sikap pencarian yang bersifat terbatas dan duniawiah ini adalah bahwa pencarian tadi bertujuan untuk mencapai kebenaran yang mutlak, yakni tuhan itu sendiri yang merupakan awal dan akhir segala kebenaran.<sup>19</sup>

Ia adalah salah satu pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah memberikan pemikiran-pemikiran keIslaman komtemporer, khususnya dalam bingkai premis yang disebut Nurcholish Madjid pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam Indonesia memasuki zaman modern.

### **Riwayat Pendidikan Nurcholish Madjid**

Sebagaimana lazimnya anak-anak santri di Jawa, tradisi penguasaan ilmu pun melalui tanjakan-tanjakan formal. Ia memasuki sekolah rakyat (SR) dan madrasah Ibtidaiyah, pesantren Darul 'Ulum, kemudian melanjutkan ke KMI (Kuliyatul Mu'allimin Islamiyah) Pondok Modern Gontor. Menamatkan di pondok itu, ia terus memasuki IAIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab. Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968 dengan menulis skripsi: *Al-Quran Lughatan Wa'alamiyyan Ma'nan*, yang maksudnya adalah "Al-quran dilihat secara bahasa bersifat local dan dilihat secara istilah bersifat global".<sup>20</sup> lalu melanjutkan studi ke Universitas Chicago sampai memperoleh gelar Doktor Kalam di bidang pemikiran Islam dengan disertasi *Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah Problem of Reason and Revelation in Islam*.<sup>21</sup>

Kebanyakan semasa aktivis mahasiswa ide-ide segarnya meluncur bagaikan anak panah tak terbandung. Baik dalam kegiatan resmi internal mahasiswa maupun dalam pertemuan khalayak ramai, Nurcholish Madjid tidak segan-segan membeberkan gagasan modernismenya.

### **Sejarah Sosial Nurcholish Madjid**

Pengembaraan intelektual yang gigih dan bermuatan kualitatif membuat Nurcholish Madjid muda telah dipercaya untuk duduk sebagai aktivis di organisasi ekstra mahasiswa sampai dua priode (ketua umum HMI 1966-1969 dan 1969-1971), bahkan pernah menjabat Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT), dan Asisten Sekretaris Jendral International Islamic Federation of Students Organisation (IIFSO). Kebanyakan semasa aktivis mahasiswa itulah ide-ide segarnya meluncur bak anak panah tak terbandung. Baik dalam forum resmi intern mahasiswa maupun dalam pertemuan khalayak ramai, Nurcholish Madjid tidak segan-segan membeberkan gagasan modernismenya.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui pengaruh awal yang paling dominan, yang mewarnai pemikiran Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan rumah dan

---

<sup>19</sup>Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq., *Op., Cit.*, hlm. 101.

<sup>20</sup>Siti Nadroh *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>21</sup>Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 238.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 239



keluarga. Dan pengaruh paling menonjol terletak pada sosok Haji Abdul Madjid, petani dari Jombang, ayah Nurcholish Madjid. Abdul Madjid inilah yang mengajarkan putranya Nurcholish Madjid, membaca al-Quran sejak Nurcholish Madjid berusia 6 tahun. Ia juga yang memberi pengaruh besar pada pendidikan dan pemikiran Nurcholish Madjid. Abdul Madjid sering dipanggil “Kia Haji” sebagai ungkapan penghormatan bagi ketinggian ilmu-ilmu keIslaman yang dimilikinya, Abdul Madjid adalah seorang murid kesayangan Kiai Hasjim Asj’ari di pesantren Tebuireng, Jombang.

Meskipun dipanggil kiai, Abdul Madjid memiliki kedudukan yang berbeda di masyarakatnya sehingga harus mengalami banyak hal yang tidak diinginkan. Ia merupakan guru biasa yang lahir dari tradisi NU namun menolak jaringan ulama NU dan ia juga menolak untuk bergabung dengan partai politik NU. Sebagai gantinya, ia kemudian menjadi anggota dan pendukung setia Masyumi, meskipun ulama tradisional pergi meninggalkan Masyumi. Akan tetapi pada saat yang sama ia diserang dengan perlakuan yang amat kasar oleh kaum Modernis. Nurcholish Madjid menuturkan bahwa seringkali ayahnya menangis di sawah karena sangat terluka oleh serangan-serangan pribadi yang dialamatkan kepadanya. Maka tidak aneh ketika Nurcholish Madjid dengan sengit menyerang kaum Modernis konservatif di awal-awal 1970-an, ayahnya adalah yang menjadi sumber dukungan emosional.<sup>23</sup>

### **Aktivitas Nurcholish Madjid Dalam Bidang Politik**

Dalam kegiatan politik dapat dilihat ketika Ridwan pemimpin Partai Masyumi baru mencalonkan Nurcholish Madjid menjadi presiden mendatang. Walaupun antara Ridwan dan Nurcholish Madjid mempunyai visi yang berbeda. Dalam hal ini Ridwan melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Dia melepaskan perbedaan-perbedaan yang ada dengan Nurcholish Madjid dan melihat kemungkinan friksi-friksi politik yang kian tajam sehingga dia mencalonkan Nurcholish Madjid yang diterima oleh banyak pihak dikarenakan akseptabilitas Nurcholish Madjid lebih besar dan kelompok yang beroposisi terhadap Nurcholish Madjid tak begitu banyak.

Mengenai pencalonan Nurcholish Madjid yang disandingkan dengan Jenderal TNI Wiranto, menurut Azyumardi Azra, ini kombinasi yang kurang pas. Kalau semua memang *committed* terhadap pembangunan masyarakat madani, akan lebih tepat Nurcholish Madjid disandingkan dengan figur sipil. Dalam hal ini, Azyumardi Azra melihat Sri Sultan Hamengku Buwono merupakan alternatif yang baik dan cukup akseptabel.<sup>24</sup>

Karena Nurcholish Madjid seorang teoretis, bukan praktisi politik, tentu saja masih dipertanyakan apakah dia akan diterima. Memang, belum tentu akseptabel kecendikiawannya juga berarti akseptabel dalam bidang politik. Akseptabilitas Nurcholish Madjid yang lebih besar itu masih teori, belum tentu dalam praktiknya.

---

<sup>23</sup>Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Pustaka Antara, 1999), hlm. 74.

<sup>24</sup>Azyumardi Azra, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 310.



Padahal, bagi pencalonan yang akan berhasil dibutuhkan disiplin, komitmen, *loyalty*, dari organisasi atau fraksi. Jadi, walaupun ide-ide Nurcholish Madjid diterima oleh semua golongan, untuk mengekspresikannya dalam dukungan yang real, belum tentu. Politik adalah soal lain. Ditambah ada yang mempersoalkan gagasan Nurcholish Madjid pada masa lalu, tetapi jumlah mereka tidak terlalu signifikan.<sup>25</sup>

### **Pemikiran Nurcholish Madjid**

Nurcholish Madjid, tahun 1968, merumuskan modernisasi adalah rasionalisasi. “pengertian yang mudah difahami mengenai modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi”. Sampai sejauh ini, pengertian Nurcholish Madjid tentang modernisasi sebagai rasionalisasi, hampir mirip dengan Harun Nasution. Karena itu “Islam Rasional,” juga melekat pada kalangan “Islam peradaban” dengan “rasional”. Selanjutnya modernisasi berarti penerapan ilmu pengetahuan, maka, modernisasi bagi Nurcholish Madjid adalah “suatu keharusan malah kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan perintah dan ajaran tuhan yang maha esa”. Nurcholish Madjid menganggap modernitas sebagai kebenaran dan modernisasi sebagai usaha atau proses mencapai kebenaran itu. “yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak, yaitu tuhan yang maha esa”.<sup>26</sup>

Lahirnya partai Islam dikarenakan Orba “tidak bersahabat” terhadap Islam. Sepanjang 32 tahun kekuasaannya, hubungan Islam dan Negara pada masa Orba dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode antagonis yang berlangsung hingga 1985 dan periode akomodatif hingga kejatuhan Orba, 1998.

Pada masa pertama, umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba. Hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak refresif terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai bung Hatta, rumusan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan pelajaran pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi Muslimah di sekolah umum dan legalisasi perjudian oleh Negara, seperti dalam TSSB, KSOB, dan Porkas. Menghadapi berbagai kebijakan ini, umat Islam menjadi oposisi dan selalu berada pada pihak yang dikalahkan.<sup>27</sup>

Dalam periode ini, Orba juga melakukan uji coba dengan kebijakan penerapan asas tunggal pancasila bagi partai-partai politik dan ormas di Indonesia. Terhadap

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 312.

<sup>26</sup> Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 296.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal & Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 210), hlm. 297.



kebijakan ini, di kalangan Islam terdapat dua sikap berbeda. Partai politik PPP dan ormas-ormas Islam lainnya, seperti HMI, Muhammadiyah, NU menerimanya, sedangkan individu-individu dan ormas lain yang kritis seperti Deliar Noer dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menolaknya karena dianggap berbau sekuler. Terhadap mereka yang menolak, Orba besikap represif. Orba membubarkan ormas-ormas Islam yang menolaknya dan menekan tokoh-tokoh vocal yang menentang kebijakan tersebut. Puncak dari kasus ini adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok September 1984 yang memakan korban ratusan umat Islam tewas di tangan aparat keamanan.

Barulah pada fase kedua, pemerintah Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Bahtiar Effendy membuktikan empat jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dalam akomodasi struktural, banyak tokoh cendekiawan Muslim yang duduk di berbagai lembaga Negara. Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholish Madjid yang mencoba mencairkan hubungan Islam dan Negara dengan gagasannya "Islam Yes, partai Islam No". Sejak tahun 1970-an, Nurcholish Madjid memang sudah gigih memperjuangkan pendekatan holistik, tidak tersekat oleh pemikiran-pemikiran sempit. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistansi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Nurcholish Madjid, partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Ide ini melahirkan respons negatif dari sebagian kalangan Islam yang masih mengimpikan pendekatan Islam politik dalam perjuangan mereka. Namun begitu, pada tahun-tahun menguatnya kekuasaan politik Orba Soeharto era 1970-1980-an, banyak tokoh-tokoh Islam yang muncul ke permukaan dan bergerak di berbagai lapangan tanpa membawa atribut-atribut Islam. Mereka adalah para terpelajar yang berbasis pada organisasi mahasiswa seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Hasil ini mencapai boomingnya pada era 1990-an, ketika terjadi hubungan yang sangat mesra antara Soeharto dan Islam. Banyak tokoh-tokoh Muslim masuk ke berbagai sektor kehidupan publik dan memegang jabatan-jabatan strategis. Tokoh-tokoh Muslim, seperti Abdul Gafur, Akbar Tandjung, Busthanul Arifin, Saleh Afiff, Azwar Anas, Hasjrul Harahap, Arifin. M. Siregar, Syamsuddin Sumintapura, Sa'adillah Mursyid, Syafruddin Baharsyah, Tarmizi Taher, dan Mar'ie Muhammad adalah tokoh-tokoh HMI yang masuk ke dalam mesin birokrasi Orde Baru.<sup>28</sup>

Ketegangan antara kekuatan politik Islam dengan pemerintah Orde Baru meningkat kembali dalam pemilu 1977. Dalam kampanye pemilu 1977, PPP mendapat dukungan luas dari kalangan elite Islam yang tidak ikut berfusi. Mereka itu antara lain M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Nurcholish Madjid. Dalam tahapan ini persaingan politik Islam dengan pemerintah dalam arena politik penuh

---

<sup>28</sup>Bahtiar Effendi, *Islam Dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm, 276.



ketegangan. Karena pada waktu itu pertikaian antara penguasa dengan Islam nyaris terjadi dalam segala sektor politik, maka wajar jika William Liddle menyebutnya sebagai *Government versus Islam*.<sup>29</sup>

Dalam rangka menggalang dukungan kaum Muslimin, KH Bisri Syansuri, sebagai Rois Aam PPP yang juga ulama kharismatis NU, menyampaikan seruannya: Menjaditeranglah kiranya perjuangan PPP termasuk *jihad fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah. Karenanya, wajib hukumnya bagi setiap peserta pemilu 1977 dari kalangan umat Islam, pria maupun wanita, terutama warga PPP, untuk turut menegakkan hukum Allah dalam kehidupan bangsa kita, dengan jalan menusuk tanda gambar PPP pada waktunya nanti. Maka, barang siapa di antara umat Islam yang menjadi peserta dalam pemilu tetapi tidak menusuk tanda gambar PPP, karena takut hilangnya kedudukan atau mata pencarian atau karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah.<sup>30</sup>

Gagasan-gagasan Nurcholish Madjid lebih banyak melakukan elaborasi pikiran-pikiran Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah modernisasi sosial-politik umat Islam Indonesia kontemporer. Rumusan “pemikiran baru” lebih bersifat empirik dan berusaha menghindari kesan apologetik. Bagi Nurcholish Madjid, mempertahankan persatuan umat dengan kata lain menghindar melakukan penyegaran pemahaman keagamaan, bukanlah suatu pendekatan praktis dalam mengikuti proses modernisasi.

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid, menyarankan agar segera digantikannya kecenderungan ideologi partai-partai dan jangan” tengelam” dengan pola lama. Ia mengkritik kecenderungan para tokoh Muslim waktu itu sebagai telah “meksakralkan” institusi-institusi profan seperti: partai Islam, ideologi Islam, dan gagasan Negara Islam. Dalam kerangka pikir Nurcholish Madjid, yang absolut hanyalah Allah semata, sedangkan persoalan Negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam tidaklah sakral, karena al-Quran juga tak memerintahkan pembentukan pranata-pranata semacam itu. Dalam bingkai premis tersebut kemudian dia menyerukan “Islam Yes, partai Islam No” sebuah slogan yang dikemukakan untuk mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmen mereka kepada nilai-nilai Islam, bukan kepada institusi-institusi kendatipun memakai nama Islam. Penolakan Nurcholish Madjid terhadap institusi kepartaian Islam haruslah dipahami sebagai penolakan bukan karena Islamnya, tetapi perlu dilihat sebagai ketidaksetujuannya terhadap pemanfaatan Islam oleh mereka yang terlibat dalam kehidupan partai politik Islam. Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam seperti itu pada gilirannya justru

---

<sup>29</sup> Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 106.



menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam sebenarnya.<sup>31</sup> Rasa tak percaya terhadap efektivitas perjuangan politik umat melalui partai Islam merupakan gejala *general* dikalangan gerakan “pemikiran baru”.

Nurcholish Madjid menyadari perlunya umat Islam mengembangkan perubahan keadaan secara gradual dan berusaha menghindari sikap resistensi dengan berposisi atau berkonfrontasi terus-menerus. Karena, akibat pilihan strategi para pemimpin politik Islam yang menekankan pertarungan ideologi dan petualangan politik yang tak menentu pada awal Orde Baru, menurut Nurcholish Madjid umat Islam tertinggal dalam persaingan dengan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang lebih modern. Nurcholish Madjid mencatat penampilan yang lebih baik dari kelompok masyarakat Cina, Kristen dan Teknokrat yang berorientasi Barat dalam perusahaan swasta dan Barat. Buat apa mengutuk keadaan itu sebagai bukti kebijakan pemerintah yang melawan Islam, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kenyataan itu merupakan bagian dari kesalahan masyarakat Islam sendiri. Jika umat Islam terus menghabiskan seluruh energinya dalam inisiatif politik yang bangkrut, mereka hanya akan semakin membawa diri sendiri terpisah dari pusat pengaruh dalam masyarakat Orde Baru.<sup>32</sup>

Gagasan-gagasan “pemikiran baru” terutama dari Nurcholish Madjid, jelas berimpit dengan strategi politik Negara yang menghendaki depolitisasi dan deideologisasi masyarakat, termasuk umat Islam. Berangkat dari kesejajaran pencapaian tujuan elite politik Orde Baru merasa berkepentingan untuk mendorong keberhasilan “pemikiran baru” dengan memberikan beberapa “hadiah politik”. Pada tahun 1974 Nurcholish Madjid dipilih sebagai anggota majelis Pembina KNPI dengan tokoh-tokoh non Muslim lainnya. Pada tahun sebelumnya Nurcholish Madjid dikirim ke negeri-negeri Muslim untuk mempelajari organisasi-organisasi pelajar di negeri-negeri Muslim. Kenyataan ini menciptakan kesan di kalangan sebagian pemimpin politik Islam, gerakan yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid tak lebih sebagai upaya menarik simpati pemerintah. Akan tetapi keterlibatan Nurcholish Madjid yang telah lama di kalangan gerakan politik Islam dan rasa percayanya yang kuat bahwa gebrakan pemikiran yang dilakukannya demi kepentingan jangka panjang umat Islam, Nurcholish Madjid tidak mundur dari gagasannya.<sup>33</sup>

## Kesimpulan

Kekuasaan dalam Pemerintahan dan politik tanpa melihat masyarakat, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Pemikiran nucholish madjid sangat berpengaruh untuk perkembangan politik di Indonesia sebagai landasan pemikiran

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 148.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 149.



adanya partai politik Islam yang tidak ada campur tangan kekuasaan luar yang ada karena kepentingan kekuasaan. Gagasan-gagasan “pemikiran baru” terutama dari Nurcholish Madjid, jelas berimpit dengan strategi politik Negara yang menghendaki depolitisasi dan deideologisasi masyarakat, termasuk umat Islam.

### Daftar Pustaka/Refrensi

Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Andrew Heyword dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Azyumardi Azra, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 310.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMENDIKBUD, 2017)

Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998).

Greg Barton, 1995. *Gagasan Islam Liberal diIndonesia*. Terjemahan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Pustaka Antara, 1999).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009).

Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Imam Yahya, *Gagasan Fikih Partai Politik Dalam Khazanah Klasik*, (Semarang: Walisongo Press, 2010).

Muhammad Iqbal & Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 210).



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah INSTITA  
Author: M. Yusuf Hasibuan | UIN Sunan Kalijaga

pISSN: XXXXX  
eISSN: XXXX-XXXX  
Vol. 3 No. 2 Oktober 2023  
Hal 100-115

Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999).

Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011).